BAB III

**PANDANGAN LEMBAGA-LEMBAGA ISLAM INDONESIA TENTANG
KEBERLAKUAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA**

A. Pandangan Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa MUI: 6/MUNAS VI/MUI/2000

Di Indonesia, otoritas yang berwenang dalam menetapkan dan mengkaji hukum Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang resmi berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 M. Lahirnya MUI merupakan hasil kesadaran kolektif dari para tokoh Islam tentang pentingnya fondasi yang kuat untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berkembang secara dinamis namun tetap berlandaskan nilai moral.¹ Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 87% dari total populasi penduduk Indonesia, yakni sebanyak 245.973.915 jiwa, memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia.²

Pandangan MUI terhadap keberlakuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Indonesia tertuang dalam Fatwa MUI: 6/Munas VI/MUI/2000 yang menetapkan: “wajib menerima, menghormati

¹Ashari Seribu Dinar, Syamsul Hilal, dan Moh. Bahruddin, “Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 8 (1 Januari 2025): 891, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.170>.

²Riska Kodansyah, “Hubungan Citra Kandidat Dan Religiusitas Dengan Keputusan Memilih Umat Islam Dalam Pemilu Legislatif 2024” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2025), 3.

dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:

- a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
- b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
 - 1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;
 - 2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat,
 - 3) Keseimbangan antara hak kebebasan dan tanggung jawab.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada fatwa ini yaitu: Pertama, merujuk pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, umat Islam diwajibkan untuk tetap konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, karena kebebasan dalam menjalankan agama merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Kedua, pemerintah dan umat Islam, khususnya para tokoh agama, diimbau untuk mensosialisasikan nilai-nilai hak asasi manusia yang selaras dengan ajaran agama, budaya lokal, norma sosial, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, fatwa ini diberlakukan sejak tanggal penetapannya dan untuk memastikan pemahaman yang luas, disarankan kepada seluruh pihak untuk turut serta dalam menyebarkan isi fatwa tersebut.³

³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/Munas VI/MUI/2000 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)* (Jakarta, 2000).

Secara umum, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dapat diterima oleh pemeluk agama Islam maupun negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Namun demikian, sejak awal kemunculannya, keberatan utama umat Islam tertuju pada Pasal 16 yang mengatur tentang perkawinan antaragama serta Pasal 18 yang menyangkut kebebasan untuk mengganti agama. Buya Hamka, dalam telaahnya, menyimpulkan bahwa “setelah membaca keseluruhan pasal dalam UDHR, semua pasal tersebut terasa menyenangkan untuk dibaca, walaupun kenyataannya banyak negara anggota PBB yang belum sepenuhnya mengimplementasikannya. Akan tetapi, ayat pertama dari Pasal 16 dan keseluruhan Pasal 18 tidak dapat saya akui,” tulis ulama yang juga merupakan penulis *Tafsir al-Azhar* tersebut. Hamka kemudian menguraikan pendiriannya sebagai berikut: “Mengapa saya tidak dapat menerima hal tersebut? Karena saya seorang Muslim. Alasan yang mendasari ketidakmampuan saya untuk menerimanya adalah identitas saya sebagai seorang Muslim, bukan sekadar Muslim secara statistik. Saya merupakan seorang Muslim yang sadar, yang mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Menurut pandangan saya, saya hanya mungkin menerima hal tersebut apabila saya meninggalkan Islam, atau sekadar mengakui identitas Islam tanpa mengamalkan atau menerapkan syariatnya, bahkan membekukannya.”⁴

⁴Asy'ari, “Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam,” *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (30 Juni 2021): 7, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.

2. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005

Sebagaimana telah diketahui, fenomena perkawinan antarumat beragama di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang telah berlangsung sejak lama. Pada era kolonial Belanda, praktik perkawinan lintas agama kerap terjadi, khususnya antara pemeluk Kristen Belanda dan masyarakat Muslim lokal. Di lingkungan tokoh publik, pernikahan beda agama ini juga cukup sering dijumpai, seperti yang dipraktekkan oleh pasangan artis nasional, Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. Keduanya melangsungkan pernikahan meskipun menganut keyakinan yang berbeda; Jamal Mirdad beragama Islam, sedangkan Lidya Kandou memeluk agama Kristen. Belum lama ini, praktik serupa kembali mencuat ke hadapan publik, yakni melalui pernikahan staf khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi (seorang Muslim), dengan Gerald Bastian, seorang penganut Katolik, yang diselenggarakan di Gereja Katedral Jakarta pada Jumat, 18 Maret 2022. Peristiwa ini memicu berbagai tanggapan di tengah masyarakat, menimbulkan perdebatan antara pihak yang mendukung dan yang menentang.⁵

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dengan mengeluarkan fatwa sebagai jawaban yuridis yang bersifat tidak mengikat secara hukum.⁶ Hingga saat ini, MUI telah mengeluarkan dua fatwa yang secara khusus mengatur mengenai persoalan perkawinan antarumat beragama. Fatwa pertama dikeluarkan dalam

⁵Daud, Rapik, dan Monita, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia," 359.

⁶Daud, Rapik, dan Monita, 359.

Musyawarah Nasional (Munas) II MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1980. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan bahwa: “(1) Pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim dinyatakan haram hukumnya; (2) Seorang pria Muslim diharamkan menikahi wanita non-Muslim. Terkait perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, MUI mencatat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama”. Namun, setelah mempertimbangkan antara aspek kemaslahatan dan kerusakannya (mafsadah), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama secara signifikan melebihi potensi manfaatnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, MUI menetapkan bahwa pernikahan semacam itu tergolong haram menurut hukum Islam. Keputusan ini dituangkan secara resmi dalam bentuk fatwa yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka selaku Ketua Umum MUI, Kafrawi sebagai Sekretaris, dan Alamsyah Ratu Perwiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama.⁷

Dalam menyusun dasar argumentasinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengacu pada sejumlah ayat dalam Al-Qur’an serta hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Qur’an yang dijadikan rujukan digunakan untuk memperkuat larangan terhadap praktik perkawinan antaragama, sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah [2]: 221

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁷Ali Mutakin, “Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia Kajian Atas Fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah,” *Al-Aḥwāl* 14, no. 1 (2021): 18.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁸

b. Surah Al-Mumtahanah [60]: 10

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآنُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقْتُمْ
حُكْمَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

c. Surah At-tahrīm [66]: 6

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰

Tiga surah awal secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam melarang terjadinya pernikahan antara orang beriman dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, syariat memberikan pengecualian dengan mengizinkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, sedangkan sebaliknya, pernikahan seorang wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab tetap dilarang. Adapun Surah Al-Tahrim [66]: 6, menekankan pentingnya menjaga keluarga dari siksa api neraka, yang secara implisit mendukung prinsip perlindungan akidah dalam membangun keluarga.¹¹

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, 550.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, 560.

¹¹Mutakin, “Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia Kajian Atas Fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah,” 18.

Fatwa kedua diterbitkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII MUI yang berlangsung di Jakarta pada tahun 2005 (fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005). Dalam putusan tersebut, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa: “(1) Pernikahan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah; (2) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, berdasarkan pendapat yang mu‘tabar (qawl mu‘tamād), juga dihukumi haram dan tidak sah.” Fatwa ini secara resmi disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh KH. Ma‘ruf Amin selaku Ketua Umum MUI serta Hasanudin sebagai Sekretaris.¹² Dalam uraian tersebut, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pernikahan beda agama dirinci menjadi dua kategori: pertama, pernikahan beda agama secara umum dihukumi haram dan tidak sah tanpa syarat (qayyid); kedua, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab juga dinyatakan haram dan tidak sah. Item kedua dalam fatwa ini, pada kenyataannya, menjadi pokok perdebatan, sebab dalam Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik, model pernikahan semacam ini telah dijelaskan secara terperinci dan oleh mayoritas ulama (jumhur) dianggap diperbolehkan.¹³

Berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 5, pada prinsipnya hukum menikahi perempuan Ahli Kitab diperbolehkan, dengan syarat bahwa pihak laki-laki (suami) yang melangsungkan pernikahan tersebut mampu

¹²Mutakin, 19.

¹³Fathul Mu'in, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Tentang Perkawinan Beda Agama," *Nizham* 7, no. 1 (Juni 2019): 98.

menampilkan kesempurnaan ajaran Islam, dan perempuan Ahli Kitab yang dinikahi harus berstatus muhshanat, yakni menjaga diri dari perbuatan tercela serta berpegang teguh pada agamanya. Namun demikian, jika merujuk pada metode sadd al-dzari'ah, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan, dapat menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia bersepakat bahwa menghindari pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab adalah pilihan yang lebih utama. Kekhawatiran utama adalah bahwa pernikahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keturunan dan mencampurkan antara kemudharatan dengan ketaatan.¹⁴

Ketentuan ini menegaskan pandangan hukum Islam di Indonesia yang menolak pernikahan lintas agama sebagai bagian dari upaya menjaga integritas akidah dan tata sosial umat Islam.¹⁵ Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 huruf (c) menyatakan: “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Sementara itu, Pasal 44 menyebutkan: “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang pernikahan beda

¹⁴Abdul Qodir Zaelani dan Edward Rinaldo, “Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (24 Juli 2023): 152–53, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>.

¹⁵Mohammad Haikal Rasyid dkk., “Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (Mei 2023): 6.

agama bagi umat Islam di Indonesia. Sedangkan pada pasal 16 DUHAM yang menyatakan pernikahan bisa terwujud tanpa dibatasi oleh agama, hal ini bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 yang melarang pernikahan beda agama pada pemaparan sebelumnya.¹⁶ Maka, dapat terlihat adanya kontadiktif antara fatwa MUI dengan pasal 16 DUHAM.

B. Pandangan Tokoh Lembaga-lembaga Islam di Indonesia

1. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama

Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki otoritas intelektual dan gerakan keagamaan yang kuat, Nahdlatul Ulama (NU) melalui keputusan Mukhtamar ke-28 yang diselenggarakan di Yogyakarta secara tegas menetapkan bahwa perkawinan antara dua individu yang berbeda agama di Indonesia tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum.¹⁷

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa Islam memiliki landasan normatif yang sah untuk menerima dan mendukung keberlakuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut pandangan beliau, yang dikenal luas

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005* (Jakarta, 2005).

¹⁷Dinda Cantik Senantya, "Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), 48.

dengan sapaan Gus Yahya, legitimasi tersebut dapat ditemukan secara eksplisit dalam ajaran Al-Qur'an dan hadits.¹⁸

Lebih lanjut, dalam kerangka dunia modern, Gus Yahya menjelaskan bahwa kehancuran global yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II, ditambah dengan ancaman nyata dari senjata nuklir, menjadi titik balik penting dalam sejarah peradaban. Keadaan tersebut mendorong terbentuknya konsensus internasional baru yang melahirkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai-nilai agama dan kesepakatan global sebagai sarana untuk mendorong partisipasi umat dalam menciptakan dunia yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan martabat setiap manusia.¹⁹

2. Tokoh-tokoh Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah, melalui Keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989, menegaskan larangan menikahi perempuan non-Muslim, termasuk yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab.²⁰ Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti konsep Ahlul Kitab pada masa kini tidak lagi identik dengan Ahlul Kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab, umat Yahudi dan Nasrani saat ini diyakini telah

¹⁸Ahmad Najib Almubarak, "Pemikiran politik Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan pengaruhnya terhadap gerak politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah menjabat Ketua Umum Nahdlatul Ulama 2021-2023" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2024), 5.

¹⁹Almubarak, 5.

²⁰Senantya, "Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia," 48.

melakukan bentuk kemusyrikan, seperti keyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah (dalam tradisi Yahudi) dan bahwa Isa adalah anak Allah (dalam ajaran Nasrani). Oleh karena itu, pernikahan lintas agama dinilai tidak sejalan dengan tujuan esensial pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, umat Islam tidak kekurangan perempuan Muslimah yang layak untuk dijadikan pasangan hidup; bahkan secara demografis jumlah perempuan Muslim lebih banyak daripada laki-laki Muslim. Larangan ini juga didasari pada prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup pintu-pintu kerusakan, demi menjaga keutuhan akidah calon pasangan dan keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut.²¹

Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal Buya Hamka salah satu tokoh Muhammadiyah menyampaikan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik berlaku secara umum tanpa pengecualian. Menurut pandangan beliau, istilah *musyrikat* dalam ayat 221 surah al-Baqarah tersebut mencakup seluruh bentuk kemusyrikan. Interpretasi Buya Hamka ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kekinian, mengingat jumlah pemeluk keyakinan yang tergolong musyrik di era modern ini sangat besar. Oleh karena itu, ayat ini dapat disimpulkan sebagai larangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan musyrik, dan sebaliknya, perempuan Muslimah untuk menikahi laki-laki musyrik. Hukum dari pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik menurut tafsir ini

²¹Marlina Syamsiyah, "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 3-4.

adalah haram, dan pandangan tersebut sejalan dengan mayoritas mufasir. Sementara itu, dalam menafsirkan Surah Al-Māidah ayat 5, Hamka berpendapat bahwa laki-laki Muslim dibolehkan menikahi perempuan yang berasal dari kalangan Ahli Kitab. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh adanya kesamaan akar ajaran antara agama Islam dan agama yang dibawa oleh Ahli Kitab.²²

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan tanggapan terkait maraknya pemberitaan tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Semarang. Dalam pernyataannya, Muhammadiyah menegaskan bahwa pernikahan lintas agama tidak diakui keabsahannya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan semacam itu tidak sah, dan oleh karena itu, ia mengimbau agar umat Islam senantiasa menjadikan aspek keagamaan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup.²³

3. Tokoh-tokoh Lain

Di Indonesia, terdapat sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Organisasi

²²Yuliana dan Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan Tarigan, "Pernikahan Beda Agama: Perspektif Al-Qur'an Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 11.

²³Isa Mawardi, "Muhammadiyah Soal Viral Nikah Beda Agama: Tak Sah Menurut UU-Hukum Islam," Berita, *Detik News* (blog), Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5976375/muhammadiyah-soal-viral-nikah-beda-agama-tak-sah-menurut-uu-hukum-islam>.

ini merupakan salah satu ormas Islam yang mengalami perkembangan signifikan di tanah air. LDII aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, antara lain pembangunan masjid, pendirian pondok pesantren, pelaksanaan pengajian, pembinaan kader, serta keterlibatan dalam bidang pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. LDII didirikan oleh almarhum Nur Hasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951, dan pada awal berdirinya dikenal dengan nama Islam Jamaah.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kerap dipersepsikan sebagai organisasi keagamaan yang bersifat eksklusif atau tertutup. Persepsi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa LDII merupakan kelompok yang berpotensi memicu konflik. Sebagian masyarakat menilai bahwa sejumlah ajaran LDII dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk di antaranya adalah larangan bagi anggotanya untuk menikah dengan individu di luar keanggotaan LDII. Perkawinan antara warga LDII dengan non-LDII dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan internal organisasi. Selain itu, beredar pula informasi di masyarakat mengenai praktik yang dikenal dengan istilah “nikah dalam”, yaitu pernikahan yang hanya dilangsungkan di hadapan amir LDII, tanpa menggunakan wali yang sah secara syariat dan tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik semacam ini menimbulkan kekhawatiran dan polemik di tengah publik, sehingga menjadi bahan perbincangan luas. Bahkan, sejumlah publikasi dan literatur populer telah membahas dan mengkritisi ajaran serta praktik yang dikaitkan dengan LDII, yang kemudian memperkuat opini masyarakat bahwa organisasi ini

menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia.²⁴

Tidak hanya menunjukkan sikap yang tidak mendukung keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak atas kebebasan untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bahkan menerapkan kebijakan internal yang lebih restriktif. Kebijakan tersebut melarang anggotanya untuk menikah dengan individu yang tidak berasal dari lingkungan organisasi atau yang bukan merupakan bagian dari komunitas LDII. Praktik ini mencerminkan eksklusivitas yang tinggi dalam kehidupan sosial-keagamaan internal organisasi tersebut, dan dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan terhadap hak-hak individu, khususnya dalam aspek kebebasan memilih pasangan hidup. Selain itu, larangan semacam ini berpotensi menimbulkan segregasi sosial serta bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap kebhinekaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dan hukum nasional Indonesia.

Ustadz Imam Mudzakkir, seorang alumni Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil, memaknai bahwa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan dengan Ahl al-Kitab memberikan kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam pandangannya, Ahl al-Kitab yang ada pada masa kini tidak berbeda secara prinsipil dengan Ahl al-Kitab pada masa terdahulu, sehingga kebolehan tersebut tetap berlaku dalam konteks

²⁴Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii)" (Jakarta, 2020), 5–7.

kontemporer. Dengan demikian, pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani tetap dibolehkan, sedangkan pernikahan dengan pemeluk agama di luar dua kelompok tersebut tidak diperkenankan.²⁵

Landasan normatif yang digunakan oleh Ustadz Imam Mudzakkir dalam memberikan justifikasi terhadap kebolehan tersebut adalah konsep *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu lima prinsip dasar yang dijaga dalam syariat Islam, meliputi: penjagaan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan keturunan, yang merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap *al-darūriyyāt*. Islam, menurutnya, tidak hanya menekankan pentingnya kesinambungan biologis umat manusia, tetapi juga menjadikan keturunan sebagai tanggung jawab spiritual yang harus dijaga dalam bingkai keimanan dan ketakwaan.²⁶

Dewan Fatwa Al Jam‘iyatul Washliyah (Al Washliyah) pada tahun 1988 mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim, termasuk yang dilakukan melalui pencatatan sipil, tidak sah menurut hukum Islam. Fatwa ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an, yakni QS. Al-Baqarah (2): 221, QS. Al-Mumtahanah (60): 10, dan QS. Al-Māidah (5): 5, serta merujuk pada kitab

²⁵Saadah dkk., *Bunga Rampai: Studi Pemikiran Tafsir Al-Qur’an* (Jember: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Jember, 2019), 51.

²⁶Saadah dkk., 52.

fikih klasik *I'ānah al-Ṭālibīn*, juz 3 halaman 344. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitāb hanya diperbolehkan jika dapat dipastikan bahwa perempuan tersebut merupakan keturunan Bani Israil dan nenek moyangnya memeluk agama tersebut sebelum terjadinya penyimpangan ajaran atau penghapusan hukum (nasakh). Namun, Dewan Fatwa Al Washliyah menilai bahwa syarat ini sangat sulit untuk diverifikasi dalam konteks kekinian, sehingga pada praktiknya, pernikahan beda agama tetap dinyatakan haram.²⁷

Fatwa tersebut juga menyoroti konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan beda agama. Dalam pandangan Dewan Fatwa, hidup berumah tangga dalam ikatan pernikahan seperti itu dipandang sebagai pergaulan di luar pernikahan yang sah menurut syariat. Hubungan biologis antara suami dan istri dianggap sebagai perzinahan, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya. Sang ayah tidak memiliki hak waris, tidak diakui sebagai wali nikah, dan wali bagi anak tersebut secara hukum Islam adalah hakim (wali hakim). Dengan mempertimbangkan dasar hukum serta dampak-dampak tersebut, Dewan Fatwa Al Washliyah menegaskan bahwa pernikahan beda agama, dalam kondisi saat ini, adalah haram dan tidak sah menurut syariat Islam.

²⁷Sarmiji Aseri dan Abu Bakar, "Kiprah Al-Washliyah di Kalimantan Selatan di Bidang Pendidikan," *Al-Banjari* 8, no. 2 (2010): 197.